

TESIS
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN
BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh:

SURYA AGUNG
2120123036

KOMISI PEMBIMBING

Dr. Ferdi, S.H.,M.H

Pembimbing I

Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn

Pembimbing II

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN
BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg)**

*Surya Agung, 2120123036, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Tahun 2023.*

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, apalagi jika dikemudian hari akta tersebut bersengketa di pengadilan dan mengandung cacat hukum, maka patut dipersoalkan. Dalam akta yang bersengketa atau mengandung cacat hukum tersebut harus diketahui pula apakah adanya unsur kesalahan murni dari Notaris, ataukah kesalahan dari para pihak dalam memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana Pasal 66 maupun perdata Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu pertama Bagaimana Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Suatu Akta Notaris Dalam Perkara Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg?, kedua Bagaimana Tanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Hasil kajian penelitian ini Pertimbangan Hakim yang menyatakan batal demi hukum suatu akta notaris dikarenakan dalam akta tersebut terdapat kesalahan materil berupa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materil walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Seperti kesalahan substansi perjanjian akta yang tidak memenuhi unsur objektif maupun subjektif Pasal 1320 KUHPidana, sebab cacat kehendak meliputi kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*). Akibat hukum pembatalan akta Notaris oleh pengadilan berdampak langsung pada keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu akta. Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan meliputi : pertanggungjawaban secara perdata akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum, pidana karena adanya pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam KUHPidana oleh Notaris seperti Pasal 263, 264 dan 266 tentang pemalsuan surat otentik dan pertanggungjawaban administratif akibat pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris.

Kata Kunci: Akta, Pembatalan, Tanggungjawab

NOTARY RESPONSIBILITY FOR DEED DECLARED LAWFULLY VOID BY THE COURT (CASE STUDY OF DECISION OF MALANG STATE COURT NUMBER 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg)

Surya Agung, 2120123036, Master of Notary, Fakultas of Law, Andalas University, 2023.

ABSTRACT

A notary as a public official has full responsibility for every deed they make, especially if later the deed is disputed in court and contains legal errors, then it is questionable. In the disputed deed which contains legal errors, it must also be known whether there is an element of pure error on the part of the Notary, or an error on the part of the parties in providing information and other supporting documents. As a result of the negligence or mistake of the Notary in making the deed it can be proven, then the Notary concerned can be held accountable both criminally Article 66 and civil Article 84 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (Hereinafter referred to as UUJN). Based on this, problems are formulated; firstly, what are the considerations of judges who declare null and void a notarial deed in case number 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg?, Secondly, what is the responsibility of a notary to a deed declared null and void In Case Number 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg? This study uses a juridical-normative approach. The result of this research study is the judge's consideration which states that a notary deed is null and void because there is a material error in the deed. The mistake was in the form of an unlawful act which resulted in the deed having no material evidentiary power even though it complies outwardly and formally it with the lawful stipulated provisions stipulated. These mistakes are like the substance of the deed agreement that does not meet the objective or subjective elements of Article 1320 of the Civil Code, because defects of will include errors or misguidance (*dwaling*), coercion (*dwang*) and fraud (*bedrog*). The notary's responsibility for a deed declared null and void by the court includes: civil liability due to an unlawful act, criminal due to a violation of the Articles in the Criminal Code by a Notary such as Articles 263, 264 and 266 concerning forgeries of authentic documents and administrative liability due to violation of the code of ethics of the Notary profession.

Key Word: Deed, Cancellation, Responsibility

